

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang, maka didapatkan beberapa pernyataan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi perangkat pemerintah daerah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang, dengan demikian H1 dapat diterima.
2. Transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi perangkat pemerintah daerah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang, dengan demikian H2 tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya salah satu hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini dapat diterima. Pernyataan-pernyataan tersebut juga telah menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dijelaskan mengenai “Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Studi Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Sampang”, maka di

1. Pemerintah disarankan untuk terus meningkatkan prinsip akuntabilitas, dan memperbaiki kualitas implementasi transparansi
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang dianggap mempengaruhi pelaksanaan pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah suatu daerah untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Peneliti menyadari bahwa ada banyak keterbatasan yang diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperbaiki. Beberapa dari keterbatasan tersebut antara lain:

1. Pada saat penelitian terdapat *website* yang tidak bisa diakses, terdapat beberapa data yang tidak ditampilkan di menu dan aksesnya terbatas bagi pengguna pada *website* BPPKAD Kabupaten Sampang lebih tepatnya mengenai data realisasi anggaran belanja.
2. Sampel penelitian ini hanya menggunakan satu organisasi saja, sehingga mungkin bisa lebih sempurna jika menggunakan beberapa organisasi sehingga dapat dijadikan pembandingan pengaruh akuntabilitas dan transparansi pada kinerja pemerintah di suatu daerah tersebut sehingga tidak berpacu pada hasil satu organisasi saja.

### **5.4 Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat beberapa implikasi baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

#### **1. Implikasi Teoritis**

Hasil penelitian ini memperkuat teori *Good Governance* yang menempatkan akuntabilitas sebagai pilar utama dalam menilai kinerja organisasi sektor publik. Temuan ini membuktikan bahwa akuntabilitas merupakan variabel yang sangat dominan dan

konsisten pengaruhnya terhadap kinerja, sehingga menjadi rujukan penting dalam pengembangan ilmu administrasi publik khususnya di bidang manajemen keuangan daerah.

Disisi lain, penelitian ini juga memberikan kontribusi baru bahwa transparansi belum tentu memberikan dampak langsung jika penerapannya hanya bersifat administratif semata, sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai indikator transparansi yang benar-benar efektif.

## 2. Implikasi Praktis

### a. Bagi Pimpinan Instansi

Hasil ini menjadi masukan bagi Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang untuk terus memprioritaskan peningkatan akuntabilitas, karena terbukti secara nyata mampu meningkatkan kinerja organisasi. Pertanggungjawaban yang jelas dan akurat harus menjadi budaya kerja.

### b. Bagi Aparatur/Pegawai

Menjadi peringatan bahwa keterbukaan informasi (transparansi) harus didukung dengan pemahaman yang baik dan upaya nyata perbaikan kinerja, bukan hanya sekedar memenuhi syarat pelaporan agar hasilnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

### c. Bagi Kebijakan

Dapat dijadikan dasar evaluasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah agar lebih fokus pada aspek akuntabilitas dan memperbaiki mekanisme transparansi agar lebih efektif dan partisipatif.